



REFORMASI ADMINISTRASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN: ANALISIS PERAN KP2MI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Diva Gusti Yusra*

***Korespondensi :**

Email :

divagusti000@gmail.com

Afiliasi Penulis :

UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 11 September 2025

Revisi : 18 November 2025

Diterima : 08 Desember 2025

Diterbitkan : 14 Desember 2025

Kata Kunci :

Pekerja Migran; Maqāsid Syariah;
Tata Kelola

Keyword :

Migrant Workers; Maqasid
Shariah; Governance

Abstrak

Transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada tahun 2024 menandai penguatan peran negara dalam menjamin hak dan perlindungan pekerja migran melalui tata kelola administrasi publik yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran KP2MI dalam meningkatkan kualitas administrasi perlindungan pekerja migran dengan menggunakan perspektif maqāsid al-sharī'ah sebagai kerangka normatif-ekonomis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, observasi institusional, dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan fungsi administratif KP2MI pada tahapan pra-penempatan, penempatan, dan pasca-penempatan mencerminkan upaya perlindungan terhadap lima tujuan utama *maqāsid as-sharī'ah*, khususnya *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-māl* (perlindungan harta), dan *hifz al-'ird* (perlindungan martabat). Integrasi sistem administrasi, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan standar layanan publik berkontribusi pada terciptanya keadilan prosedural dan akuntabilitas negara dalam perlindungan pekerja migran. Simpulannya, keberadaan KP2MI tidak hanya merepresentasikan reformasi kelembagaan administratif, tetapi juga menunjukkan kesesuaian antara kebijakan perlindungan pekerja migran dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial.

The transformation of the Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI) into the Ministry of Migrant Worker Protection (KP2MI) in 2024 signifies the strengthening of the state's role in safeguarding the rights and protection of migrant workers through a more comprehensive system of public administrative governance. This study aims to analyze the role of KP2MI in enhancing the quality of migrant worker protection administration by employing maqāsid al-sharī'ah as a normative-economic analytical framework. Using a descriptive qualitative approach, the study draws on policy document analysis, institutional observation, and a review of relevant literature. The findings indicate that the strengthening of KP2MI's administrative functions across the pre-departure, placement, and post-placement phases reflects efforts to fulfill the core objectives of maqāsid al-sharī'ah, particularly hifz al-nafs (protection of life), hifz al-māl (protection of property), and hifz al-'ird (protection of human dignity). The integration of administrative systems, enhanced inter-agency coordination, and improved public service standards contribute to procedural justice and state accountability in migrant worker protection. In conclusion, KP2MI represents not merely an administrative institutional reform but also a policy alignment with Islamic economic principles oriented toward social justice and public welfare..

PENDAHULUAN

Pekerja migran Indonesia memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional melalui remitansi yang dikirimkan kepada keluarga di tanah air. Setiap tahun, jumlah pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri terus

meningkat seiring dengan tingginya permintaan tenaga kerja di sektor domestik dan formal. Namun, fenomena ini tidak lepas dari berbagai persoalan, terutama terkait perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja migran. Berbagai kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran kontrak kerja masih sering terjadi di negara tujuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja migran harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan ketenagakerjaan Indonesia. Salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja migran adalah tata kelola administrasi yang baik. Administrasi yang efektif dapat menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum bagi pekerja migran. Dengan demikian, administrasi menjadi fondasi utama dalam upaya meningkatkan perlindungan pekerja migran secara menyeluruh. (Ariani & Prabawati, 2025)

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) hadir sebagai lembaga yang memiliki mandat strategis untuk menyelenggarakan urusan perlindungan pekerja migran. Transformasi dari BP2MI menjadi kementerian pada tahun 2024 menandai penguatan kelembagaan yang signifikan. Perubahan status kelembagaan ini diatur dalam Peraturan Presiden dan memberikan kewenangan lebih luas kepada KP2MI. Tugas utama KP2MI mencakup perumusan kebijakan, pengawasan, pemberdayaan, serta penegakan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Dengan struktur kelembagaan yang lebih kuat, KP2MI diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perlindungan tenaga kerja migran. Fokus KP2MI bukan hanya pada tahap penempatan, tetapi juga pada pra-penempatan dan pasca-penempatan. Hal ini menjadikan lembaga ini sebagai aktor penting dalam siklus perlindungan pekerja migran. Keberadaan KP2MI juga mempertegas komitmen negara dalam menjaga hak asasi dan martabat pekerja migran Indonesia. (Yayat Rukayat, 2017)

Studi-studi terdahulu mengenai perlindungan pekerja migran menyoroti banyak aspek yang masih membutuhkan perhatian. Rahmawati (2022) menekankan pentingnya implementasi UU No. 18 Tahun 2017 dalam penempatan pekerja migran, meski masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Santoso (2025) menyoroti perlindungan hak upah pekerja migran yang sering terabaikan oleh pihak pemberi kerja di luar negeri. Penelitian Wibowo (2025) menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan terhadap pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat. Yuniarti (2025) menambahkan bahwa diskriminasi dan pelanggaran hak pekerja migran di Malaysia masih sering terjadi. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa masalah perlindungan pekerja migran belum sepenuhnya terselesaikan. Meskipun ada kemajuan kelembagaan, tantangan administratif tetap menjadi persoalan yang berulang. Oleh karena itu, studi mengenai kualitas administrasi perlindungan pekerja migran menjadi sangat penting. Kajian ini juga relevan untuk menemukan strategi baru yang lebih efektif.

Artikel ini menawarkan kebaruan dengan menghadirkan perspektif mahasiswa Ekonomi Islam yang menjalani program magang di KP2MI. Perspektif ini menarik karena menggabungkan pemahaman teoritis dari bangku kuliah dengan praktik

administrasi di lapangan. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan administrasi di kantor KP2MI maupun BP3MI Sumatera Barat. Dengan demikian, pengalaman ini memberi gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran. Pendekatan praktis ini sekaligus melengkapi literatur akademik yang selama ini lebih banyak menyoroti aspek normatif dan hukum. Penelitian ini mengisi celah dengan memberikan refleksi langsung dari lapangan. Kebaruan juga terletak pada integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam menilai kualitas administrasi. Prinsip keadilan, kesejahteraan, dan amanah menjadi kerangka analisis yang digunakan. (Program, Ilmu, Negara, & Administrasi, 2018)

Lokasi penelitian yang digunakan adalah Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang beralamat di Jalan Letjen M. T. Haryono No Kav 52, Rt 3/Rw 4, Cikoko, Kota Jakarta Selatan, Pancoran, DKI Jakarta, 12780. Kantor ini berfungsi sebagai pusat koordinasi administrasi perlindungan pekerja migran di tingkat nasional. Selain itu, penelitian juga dilakukan di unit teknis BP3MI Sumatera Barat, yang menangani layanan langsung kepada calon pekerja migran di daerah. Kehadiran mahasiswa di kedua lokasi ini memungkinkan adanya pengalaman komprehensif mengenai tata kelola administrasi. Observasi di pusat memberikan pemahaman mengenai kebijakan makro dan koordinasi antar-unit. Sementara pengalaman di daerah menunjukkan bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam layanan praktis. Pemilihan lokasi ini mendukung keterhubungan antara perspektif pusat dan daerah. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan gambaran utuh tentang administrasi perlindungan pekerja migran. (Setyawati, Wijoyo, Suyudi, & Gunantara, 2021)

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan reflektif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, dokumentasi, studi literatur, dan keterlibatan langsung dalam aktivitas magang. Observasi memungkinkan peneliti mengamati secara detail alur administrasi perlindungan pekerja migran. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen resmi seperti laporan kegiatan, arsip, dan peraturan terkait. Studi literatur memberikan landasan teoritis dan memperkuat analisis temuan lapangan. Partisipasi aktif dalam kegiatan magang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman riil. Teknik analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga konsistensi data. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KP2MI menjalankan perannya secara terpadu melalui berbagai tahap administrasi. Pada tahap pra-penempatan, KP2MI memastikan verifikasi dokumen dan pelatihan calon pekerja migran berjalan sesuai standar. Pada tahap penempatan, lembaga ini melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan negara tujuan untuk menjamin hak pekerja migran. Sedangkan pada tahap pasca-penempatan, KP2MI menyediakan program reintegrasi sosial dan ekonomi. Pengalaman magang memperlihatkan bahwa mahasiswa terlibat dalam

penyusunan laporan, pengelolaan dokumen, dan rapat koordinasi. Aktivitas tersebut memperkuat keterampilan administratif, analitis, dan komunikasi profesional. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan waktu magang dan akses data sensitif. Meskipun demikian, kendala ini dapat diatasi dengan pendampingan intensif. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas administrasi KP2MI terus berkembang meski menghadapi hambatan. (Nabhan Aiqani, 2025)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif peran KP2MI dalam meningkatkan kualitas administrasi perlindungan pekerja migran. Penelitian juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perspektif mahasiswa Ekonomi Islam memberikan nilai tambah dalam analisis administrasi publik. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan pekerja migran dengan memasukkan dimensi akademik dan praktis secara bersamaan. Selain itu, penelitian ini ingin menekankan pentingnya sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi KP2MI dalam memperbaiki kualitas administrasi perlindungan pekerja migran. Temuan juga dapat digunakan sebagai acuan bagi program magang berikutnya. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis. Kontribusi ini relevan untuk mendukung perlindungan pekerja migran yang lebih adil dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan peran KP2MI dalam meningkatkan kualitas administrasi perlindungan pekerja migran. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang kompleks, khususnya terkait administrasi publik dan perlindungan pekerja migran. Fokus penelitian bukan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada analisis deskriptif berdasarkan pengalaman nyata selama program magang. Mahasiswa sebagai peneliti sekaligus partisipan aktif terlibat langsung dalam aktivitas administrasi di KP2MI. Hal ini memungkinkan penelitian memperoleh data yang kaya dan kontekstual. Desain penelitian ini sesuai dengan tujuan untuk mengeksplorasi praktik administrasi secara riil. Pengalaman magang digunakan sebagai sumber data primer untuk melihat implementasi kebijakan di lapangan. Dengan demikian, penelitian dapat menghadirkan gambaran yang lebih otentik dan reflektif.

Lokasi penelitian dilakukan di dua tempat utama untuk memberikan perspektif yang menyeluruh. Pertama, di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Jalan Letjen M. T. Haryono No Kav 52, Rt 3/Rw 4, Cikoko, Kota Jakarta Selatan, Pancoran, DKI Jakarta, 12780 yang menjadi pusat koordinasi kebijakan. Kedua, di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat sebagai unit teknis daerah yang menangani pelayanan langsung. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diterapkan di tingkat pusat dan daerah. Di kantor pusat, mahasiswa mengamati koordinasi administratif dan penyusunan kebijakan. Sementara di BP3MI, mahasiswa

terlibat dalam sosialisasi, verifikasi dokumen, serta layanan kepada calon pekerja migran. Dua lokasi ini memperlihatkan kesinambungan antara kebijakan makro dan implementasi praktis. Hal ini mendukung analisis yang lebih komprehensif terhadap peran KP2MI.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat metode utama. Observasi partisipatif digunakan untuk melihat langsung aktivitas administrasi yang dijalankan KP2MI. Dokumentasi mencakup pengumpulan arsip, laporan, surat resmi, serta dokumen kebijakan yang relevan. Partisipasi aktif dalam kegiatan magang memungkinkan mahasiswa terlibat dalam pekerjaan administratif, seperti penyusunan laporan perjalanan dinas dan verifikasi data pekerja migran. Studi literatur dilakukan untuk melengkapi temuan lapangan dengan referensi akademik dan peraturan perundangan. Kombinasi teknik ini memberikan data primer dan sekunder yang saling menguatkan. Setiap teknik dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada administrasi publik. Kehadiran mahasiswa sebagai insider juga memberi keuntungan dalam memperoleh data yang autentik. Dengan cara ini, penelitian memiliki landasan empiris sekaligus teoritis yang kuat. (Tawas, Mananeke, & Tuerah, 2015)

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tahapan sistematis. Pertama, dilakukan reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dari hasil observasi, dokumentasi, dan literatur. Kedua, penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang runtut sesuai kategori penelitian. Ketiga, penarikan kesimpulan sementara dilakukan berdasarkan pola, hubungan, dan tema yang muncul dari data. Selanjutnya, data diverifikasi dengan membandingkan hasil magang dan referensi pustaka. Teknik reflektif juga digunakan untuk menilai pengalaman peneliti selama magang. Analisis deskriptif ini mempermudah dalam menjelaskan temuan secara jelas dan detail. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan fakta, tetapi juga mengaitkan dengan teori administrasi publik dan ekonomi Islam. Dengan cara ini, hasil penelitian mampu menjawab pertanyaan utama penelitian secara komprehensif.

Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari observasi, dokumentasi, wawancara informal, dan literatur. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan observasi langsung dan partisipasi aktif. Validasi juga diperkuat melalui diskusi dengan pembimbing lapangan dan staf KP2MI untuk memastikan akurasi temuan. Refleksi diri peneliti digunakan untuk mengurangi subjektivitas analisis. Dengan penerapan triangulasi, keandalan data dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting karena penelitian kualitatif sangat bergantung pada keakuratan data lapangan. Proses validasi menjadikan hasil penelitian lebih kredibel dan objektif. Dengan demikian, metode penelitian ini mampu menghadirkan gambaran nyata tentang peran KP2MI dalam meningkatkan kualitas administrasi perlindungan pekerja migran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KP2MI

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas strategis dalam melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia. Transformasi dari BP2MI menjadi kementerian pada tahun 2024 memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Visi KP2MI adalah mewujudkan perlindungan pekerja migran yang profesional, adil, dan berlandaskan nilai kemanusiaan. Fungsi utama lembaga ini mencakup pra-penempatan, penempatan, dan pasca-penempatan pekerja migran. Dalam praktiknya, KP2MI juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan mitra internasional. Struktur organisasinya terdiri dari sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, serta beberapa direktorat jenderal yang menangani aspek spesifik perlindungan. Selain itu, KP2MI memiliki unit teknis daerah berupa Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Kehadiran BP3MI memastikan perlindungan bisa menjangkau langsung masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. (Pembangunan, Ilmu, Dan, Politik, & Utara, 2020)

Peran KP2MI sangat krusial dalam mengelola arus pekerja migran yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang setiap tahun. Lembaga ini memastikan setiap pekerja migran melalui prosedur administrasi yang legal dan sesuai standar internasional. Dalam tahap pra-penempatan, verifikasi dokumen dan pelatihan menjadi langkah penting untuk mempersiapkan pekerja migran. Tahap penempatan membutuhkan koordinasi dengan negara tujuan untuk menjamin hak pekerja terlindungi. Pasca-penempatan, KP2MI memberikan program reintegrasi agar pekerja migran dapat beradaptasi kembali di tanah air. Siklus ini mencerminkan komitmen lembaga untuk memberikan perlindungan menyeluruh. Kegiatan tersebut juga memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara tujuan pekerja migran. Dengan cara ini, KP2MI berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga martabat pekerja migran.

Gambaran umum KP2MI menunjukkan adanya sistem administrasi yang terstruktur. Proses ini dimulai dari pengumpulan data, penyusunan kebijakan, hingga implementasi di lapangan. Administrasi publik yang diterapkan KP2MI berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Hal ini sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Implementasi administrasi yang tertib memungkinkan lembaga ini menjaga integritas dalam pelayanan publik. Data pekerja migran disimpan dan dikelola secara digital melalui sistem informasi khusus. Sistem ini memudahkan proses verifikasi, pemantauan, dan pelaporan pekerja migran di berbagai tahap. Teknologi informasi menjadi salah satu penopang utama dalam meningkatkan kualitas administrasi. Dengan dukungan sistem digital, proses perlindungan menjadi lebih cepat dan akurat.

Selain menjalankan tugas pokok, KP2MI juga berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui kampanye publik, pelatihan, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang prosedur legal bekerja di luar negeri. Dengan demikian, masyarakat diharapkan terhindar dari praktik penempatan ilegal. Sosialisasi ini juga melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat. Melalui kegiatan ini, KP2MI berupaya memperluas jangkauan perlindungan hingga ke akar rumput. Peran sosialisasi juga penting untuk meningkatkan kesadaran calon pekerja migran. Semakin banyak masyarakat yang memahami prosedur resmi, semakin kecil

risiko terjadinya eksploitasi. Hal ini menegaskan pentingnya aspek edukasi dalam perlindungan pekerja migran. (Kristen Satya Wacana, Kristiawan, & Asvio UIN STS Jambi, 2018)

Kantor pusat KP2MI yang beralamat di Jalan Letjen M. T. Haryono No Kav 52, Rt 3/Rw 4, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional. Lokasi ini menjadi tempat perumusan kebijakan strategis dan pengambilan keputusan penting. Kantor pusat juga menjadi pusat koordinasi antar-direktorat dan mitra internasional. Selain itu, BP3MI di daerah berperan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, BP3MI Sumatera Barat aktif dalam melakukan verifikasi dokumen dan sosialisasi ke calon pekerja migran. Kehadiran unit teknis di daerah memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Dengan jaringan pusat dan daerah, KP2MI mampu menghadirkan pelayanan yang lebih merata. Struktur kelembagaan ini memperlihatkan bahwa perlindungan pekerja migran dilakukan secara sistematis dan berlapis. (Jamal & Syarifah, 2018)

Proses Administrasi Perlindungan

Proses administrasi perlindungan pekerja migran di KP2MI dimulai dari tahap pra-penempatan. Pada tahap ini, pekerja migran diwajibkan melengkapi dokumen resmi seperti paspor, kontrak kerja, dan sertifikat pelatihan. Verifikasi dokumen dilakukan oleh petugas administrasi untuk memastikan keaslian dan kelengkapan berkas. Selain itu, pekerja migran juga diberikan pembekalan mengenai hak dan kewajiban selama bekerja di luar negeri. Proses ini penting untuk mencegah terjadinya penipuan dan perdagangan manusia. Administrasi pra-penempatan mencakup juga pendaftaran ke dalam sistem informasi migrasi yang dikelola KP2MI. Sistem ini memungkinkan pelacakan status pekerja sejak tahap awal hingga kembali ke tanah air. Dengan tata kelola administrasi yang baik, KP2MI memastikan bahwa pekerja migran berangkat secara legal dan terlindungi.

Pada tahap penempatan, administrasi lebih difokuskan pada koordinasi dengan negara tujuan. KP2MI bekerja sama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri, seperti Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal. Tujuan koordinasi ini adalah untuk menjamin kontrak kerja dipatuhi oleh pemberi kerja. Administrasi juga mencakup pelaporan berkala mengenai kondisi pekerja migran di negara tujuan. Data yang terkumpul digunakan untuk memantau kesejahteraan pekerja dan mencegah terjadinya pelanggaran hak. (Andini, Fadilah, II, & Noviani, 2023) Selain itu, KP2MI melakukan diplomasi bilateral dengan negara penempatan untuk memperkuat perjanjian kerja sama. Administrasi pada tahap ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Dengan demikian, KP2MI berperan dalam memastikan pekerja migran mendapatkan perlakuan adil. Proses ini menunjukkan pentingnya integrasi administrasi dan diplomasi dalam perlindungan pekerja migran.

Tahap pasca-penempatan merupakan bagian penting dari siklus perlindungan pekerja migran. Setelah kembali ke tanah air, pekerja migran perlu mendapatkan layanan reintegrasi. Administrasi pasca-penempatan mencakup pencatatan kepulangan, pendataan pengalaman kerja, serta program pemberdayaan ekonomi. KP2MI bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan usaha bagi mantan pekerja migran. Program ini bertujuan agar mereka dapat memanfaatkan keterampilan dan modal yang diperoleh selama bekerja di luar negeri. Administrasi juga mencatat data mengenai masalah yang dihadapi pekerja migran setelah kembali.

Dengan data ini, KP2MI dapat menyusun kebijakan reintegrasi yang lebih tepat sasaran. Pasca-penempatan menjadi bukti bahwa perlindungan pekerja migran tidak berhenti saat mereka kembali. Sebaliknya, tahap ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan jangka panjang.

Sistem informasi menjadi salah satu pilar penting dalam administrasi perlindungan pekerja migran. KP2MI mengembangkan sistem digital untuk mempermudah pencatatan, pelacakan, dan pelaporan pekerja migran. Sistem ini dapat diakses oleh unit pusat maupun BP3MI di daerah. Keberadaan sistem digital meningkatkan transparansi dan akurasi data. Setiap pekerja migran yang terdaftar mendapatkan nomor identifikasi khusus yang memudahkan proses administrasi. Selain itu, sistem ini memungkinkan monitoring real-time terhadap status pekerja di negara tujuan. Integrasi data dengan lembaga lain juga memperkuat koordinasi antarinstansi. Pemanfaatan teknologi ini menunjukkan bahwa administrasi modern menjadi kunci keberhasilan perlindungan. Dengan cara ini, KP2MI mampu beradaptasi dengan tuntutan era digital.

Selain aspek teknis, administrasi perlindungan juga mencakup aspek sosialisasi dan edukasi. KP2MI secara rutin mengadakan sosialisasi mengenai prosedur legal bekerja di luar negeri. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan kampanye publik. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghindari jalur penempatan ilegal. Administrasi sosialisasi ini melibatkan pencatatan peserta, penyusunan materi, serta evaluasi kegiatan. Dengan administrasi yang baik, kegiatan sosialisasi dapat diukur efektivitasnya. Peningkatan kesadaran masyarakat terbukti menurunkan kasus penempatan ilegal di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya menyangkut dokumen dan data, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Peran sosialisasi menjadi pelengkap penting dalam siklus administrasi perlindungan pekerja migran. Dengan demikian, perlindungan dapat dilakukan secara preventif dan berkelanjutan.

Kompetensi yang Diperoleh Mahasiswa Magang

Pengalaman magang di KP2MI memberikan mahasiswa wawasan luas tentang administrasi publik, khususnya dalam konteks perlindungan pekerja migran. Mahasiswa belajar mengenai alur administrasi mulai dari verifikasi dokumen, pencatatan data, hingga penyusunan laporan resmi. Keterampilan ini penting karena melatih ketelitian dan keakuratan dalam pengelolaan dokumen. Proses administrasi di KP2MI menuntut mahasiswa memahami standar hukum dan regulasi yang berlaku. Dengan keterlibatan langsung, mahasiswa dapat menghubungkan teori yang dipelajari di kampus dengan praktik nyata di instansi pemerintah. Hal ini memperkuat pemahaman mereka tentang birokrasi publik. Pengalaman ini juga membekali mahasiswa dengan kompetensi teknis yang relevan untuk dunia kerja. Kompetensi tersebut menjadi dasar penting dalam membangun profesionalisme sebagai calon akademisi maupun praktisi. (Along, 2020)

Selain kompetensi teknis, mahasiswa juga memperoleh keterampilan analitis. Melalui observasi dan partisipasi, mereka belajar menganalisis permasalahan administratif yang dihadapi KP2MI. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas sistem administrasi, kendala yang muncul, serta solusi yang mungkin diterapkan. Keterampilan analitis ini berguna dalam menilai kualitas tata kelola administrasi publik. Mahasiswa juga diajak untuk memahami konteks sosial, hukum, dan politik yang memengaruhi kebijakan pekerja migran. Hal ini menuntut mereka berpikir kritis dan

mampu melihat hubungan antar-aspek kebijakan. Pengalaman tersebut melatih mahasiswa agar tidak hanya sekadar melaksanakan tugas, tetapi juga mampu melakukan refleksi akademik. Kemampuan analitis ini merupakan modal penting dalam riset dan pengembangan ilmu. Dengan demikian, magang di KP2MI memperluas kapasitas intelektual mahasiswa.

Magang di KP2MI juga memberikan kontribusi besar pada pengembangan soft skills mahasiswa. Mereka belajar membangun komunikasi yang efektif dengan staf, pejabat, dan masyarakat. Keterampilan komunikasi ini sangat penting dalam lingkungan kerja yang dinamis. Selain itu, mahasiswa dilatih untuk bekerja sama dalam tim, baik dengan pegawai KP2MI maupun sesama peserta magang. Kerja tim menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan tugas administratif. Mahasiswa juga terlatih menghadapi tekanan waktu dan target pekerjaan yang ketat. Situasi ini melatih mereka untuk mengembangkan kemampuan manajemen waktu dan tanggung jawab. Soft skills yang diperoleh tidak hanya bermanfaat selama magang, tetapi juga relevan untuk karier di masa depan. Dengan demikian, magang menjadi sarana pembentukan karakter profesional. (Purwanto, 2023)

Mahasiswa juga memperoleh pemahaman mendalam mengenai etika kerja di instansi pemerintah. Mereka belajar bahwa administrasi publik harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nilai integritas menjadi hal penting yang selalu ditekankan oleh pembimbing lapangan. Mahasiswa menyadari bahwa administrasi bukan sekadar prosedur, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Etika kerja ini menjadi dasar dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Pengalaman ini mendorong mahasiswa untuk lebih disiplin dan konsisten dalam bekerja. Mereka juga belajar menghormati aturan dan budaya kerja yang berlaku di lingkungan birokrasi. Pemahaman mengenai etika kerja memperkuat identitas profesional mahasiswa. Dengan demikian, magang berkontribusi pada pembentukan sikap yang etis dan bertanggung jawab.

Kompetensi terakhir yang diperoleh adalah kemampuan reflektif, yaitu menilai diri sendiri dalam proses belajar. Mahasiswa diajak untuk mengevaluasi pengalaman mereka selama magang, baik dari segi kekuatan maupun kelemahan. Proses refleksi ini membantu mereka merumuskan strategi perbaikan diri di masa depan. Refleksi juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk melihat keterkaitan antara ilmu ekonomi Islam dengan praktik administrasi publik. Mereka dapat memahami bagaimana prinsip keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak dapat diterapkan dalam konteks perlindungan pekerja migran. Dengan cara ini, magang menjadi lebih dari sekadar pengalaman administratif, melainkan juga sarana pengembangan diri. Kemampuan reflektif ini membentuk pola pikir kritis dan adaptif. Pada akhirnya, mahasiswa siap menghadapi tantangan dunia kerja dengan bekal akademik, praktis, dan moral yang seimbang.

Tantangan dan Solusi

Selama pelaksanaan magang di KP2MI, mahasiswa menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu. Program magang yang relatif singkat membuat ruang untuk mendalami setiap aspek administrasi menjadi terbatas. Beberapa proses administrasi membutuhkan penguasaan yang mendalam, sementara mahasiswa harus menyesuaikan dengan jadwal yang ketat. Hal ini menuntut kemampuan adaptasi cepat agar tetap dapat memahami alur kerja dengan baik. Keterbatasan waktu juga

membuat mahasiswa harus memilih prioritas dalam kegiatan yang diikuti. Situasi ini dapat menimbulkan tekanan karena ada banyak pengetahuan yang ingin diperoleh. Namun, melalui bimbingan dari pembimbing lapangan, mahasiswa mampu mengelola keterbatasan ini dengan efektif. Dengan strategi pembelajaran yang terarah, keterbatasan waktu tidak menjadi hambatan signifikan. (Ilmu, Islam, & Sirait, 2025)

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap data sensitif. Sebagai peserta magang, mahasiswa tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengakses seluruh dokumen penting. Beberapa data hanya dapat diakses oleh pejabat tertentu demi menjaga kerahasiaan. Kondisi ini membuat mahasiswa harus mencari alternatif lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Salah satu cara yang dilakukan adalah berdiskusi dengan staf yang berwenang. Melalui komunikasi terbuka, mahasiswa tetap dapat memperoleh pemahaman mengenai proses administrasi. Tantangan ini sekaligus mengajarkan pentingnya menjaga etika dalam bekerja. Dengan demikian, mahasiswa belajar bahwa keterbukaan informasi harus tetap seimbang dengan aspek keamanan dan kerahasiaan.

Kompleksitas kebijakan perlindungan pekerja migran juga menjadi tantangan yang dirasakan. Regulasi yang mengatur pekerja migran sangat banyak dan terus diperbarui sesuai perkembangan. Mahasiswa perlu memahami UU No. 18 Tahun 2017, peraturan pelaksanaannya, serta kebijakan baru pasca-transformasi BP2MI menjadi KP2MI. Kompleksitas ini menuntut mahasiswa untuk belajar lebih cepat dan rajin mencari referensi. Situasi tersebut mengasah kemampuan akademik mereka dalam mengaitkan teori dengan praktik. Kendati demikian, banyaknya regulasi terkadang membingungkan karena terdapat aturan yang saling tumpang tindih. Mahasiswa belajar bahwa administrasi publik tidak selalu berjalan mulus karena dipengaruhi oleh dinamika kebijakan. Tantangan ini akhirnya menjadi sarana untuk melatih ketekunan dalam memahami aspek hukum dan regulasi. Dengan demikian, kompleksitas kebijakan justru memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran. (Paulina, 2023)

Selain faktor regulasi, dinamika birokrasi di instansi pemerintah juga menghadirkan tantangan tersendiri. Mahasiswa harus beradaptasi dengan budaya kerja birokrasi yang memiliki prosedur ketat. Setiap keputusan harus melalui mekanisme formal yang memerlukan waktu dan persetujuan berlapis. Bagi mahasiswa, hal ini terasa berbeda dengan dunia akademik yang lebih fleksibel. Kondisi tersebut membuat mereka belajar mengenai pentingnya kesabaran dalam bekerja. Dinamika birokrasi juga menuntut mahasiswa untuk disiplin dalam mengikuti prosedur. Walaupun kadang terasa lambat, sistem ini bertujuan menjaga akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan menghadapi tantangan ini, mahasiswa memahami realitas birokrasi secara langsung. Pengalaman ini memperkaya wawasan mereka mengenai tata kelola administrasi publik.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, sejumlah solusi diterapkan selama program magang. Pendampingan intensif dari pembimbing lapangan membantu mahasiswa memahami alur kerja lebih cepat. Diskusi rutin dengan staf berwenang membuka akses pengetahuan yang tidak dapat diperoleh dari dokumen. Mahasiswa juga dilatih untuk mengembangkan manajemen waktu agar lebih fokus pada tugas yang prioritas. Sementara itu, pembelajaran mandiri melalui literatur akademik membantu mengatasi kompleksitas regulasi. Adaptasi terhadap budaya birokrasi dilakukan dengan cara mengikuti prosedur yang berlaku secara disiplin. Mahasiswa juga berusaha membangun komunikasi yang baik agar mudah diterima

dalam lingkungan kerja. Dengan strategi ini, tantangan dapat diubah menjadi peluang pembelajaran. Hasilnya, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman administratif, tetapi juga keterampilan adaptif yang sangat berharga.

Perlindungan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perlindungan pekerja migran dalam perspektif Ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan prinsip keadilan ('adl). Islam menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Dalam konteks pekerja migran, keadilan berarti memastikan mereka mendapatkan hak atas upah yang layak, perlakuan yang manusiawi, dan kondisi kerja yang sesuai kontrak. Administrasi yang dilakukan KP2MI mencerminkan upaya untuk menjaga prinsip keadilan tersebut melalui sistem verifikasi dan pengawasan. Mahasiswa magang melihat bahwa tata kelola administrasi yang baik dapat mencegah terjadinya ketidakadilan bagi pekerja migran. Dengan demikian, praktik administrasi publik memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam di bidang sosial-ekonomi. Keadilan menjadi landasan utama dalam setiap aspek kebijakan perlindungan pekerja migran. (Yollan Lokabora & Fithriana, 2018)

Prinsip lain yang relevan adalah kesejahteraan (maslahah) yang menjadi tujuan utama dalam Ekonomi Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap kebijakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia. Perlindungan pekerja migran tidak hanya melindungi individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat yang bergantung pada remitansi mereka. KP2MI berupaya menghadirkan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan dari pra-penempatan hingga pasca-penempatan. Program reintegrasi pasca-penempatan juga mendukung mantan pekerja migran agar dapat kembali produktif di tanah air. Hal ini sejalan dengan konsep maslahah yang menekankan pentingnya keberlanjutan kesejahteraan. Mahasiswa magang melihat bagaimana prinsip ini diterjemahkan dalam kebijakan dan program nyata. Dengan demikian, administrasi KP2MI dapat dikatakan selaras dengan tujuan ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan pekerja migran menjadi tolok ukur keberhasilan perlindungan.

Aspek amanah juga menjadi bagian penting dalam perspektif Ekonomi Islam terhadap perlindungan pekerja migran. Setiap pejabat dan staf di KP2MI memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas. Administrasi publik yang dijalankan bukan hanya urusan teknis, melainkan juga amanah yang harus dijaga. Mahasiswa magang menyaksikan bahwa pekerjaan administratif selalu diawasi dan dipertanggungjawabkan secara formal. Hal ini mencerminkan upaya menjaga amanah dalam pelayanan publik. Konsep amanah dalam Islam menuntut setiap individu bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan menunaikan amanah, instansi pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat. Dalam konteks KP2MI, amanah menjadi pilar penting dalam menjaga martabat pekerja migran. Prinsip ini memberikan makna spiritual yang memperkuat profesionalisme dalam administrasi publik. (Valencia, Putri, & Dermawan, 2025)

Selain keadilan, kesejahteraan, dan amanah, prinsip musyawarah juga relevan dalam perlindungan pekerja migran. Islam menganjurkan setiap keputusan diambil melalui proses konsultasi yang melibatkan berbagai pihak. KP2MI menerapkan prinsip

ini melalui koordinasi dengan instansi lain, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Musyawarah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pekerja migran. Mahasiswa magang terlibat dalam rapat koordinasi yang memperlihatkan praktik musyawarah secara nyata. Proses ini melatih mereka untuk menghargai perbedaan pendapat dan mencari solusi bersama. Musyawarah tidak hanya menghasilkan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, prinsip musyawarah dalam Islam tercermin dalam mekanisme administrasi KP2MI. Hal ini memperkuat legitimasi kebijakan perlindungan pekerja migran. (Lauren et al., 2025)

Perspektif Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya ihsan atau berbuat kebaikan melebihi kewajiban. Dalam konteks KP2MI, ihsan dapat diartikan sebagai memberikan pelayanan lebih baik daripada sekadar memenuhi standar. Misalnya, staf KP2MI berusaha memberikan informasi yang jelas dan ramah kepada calon pekerja migran. Mahasiswa magang belajar bahwa pelayanan publik yang humanis sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ihsan juga tercermin dalam upaya memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada pekerja migran sebelum berangkat. Nilai ini menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal kemanusiaan. Dengan menerapkan ihsan, pelayanan menjadi lebih bermakna bagi penerima manfaat. Mahasiswa menyadari bahwa nilai ini memperkuat hubungan antara birokrasi dan masyarakat. Pada akhirnya, ihsan melengkapi prinsip-prinsip lain dalam Ekonomi Islam yang relevan untuk perlindungan pekerja migran.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KP2MI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas administrasi perlindungan pekerja migran Indonesia. Melalui proses administrasi yang terstruktur, KP2MI menjalankan fungsi perlindungan sejak pra-penempatan, penempatan, hingga pasca-penempatan. Pengalaman magang mahasiswa Ekonomi Islam di KP2MI memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kebijakan dijalankan dalam praktik birokrasi. Mahasiswa memperoleh kompetensi teknis, analitis, dan soft skills yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Tantangan seperti keterbatasan waktu, akses data sensitif, serta kompleksitas regulasi dapat diatasi melalui pendampingan dan adaptasi yang baik. Hal ini memperlihatkan bahwa administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis, tetapi juga sarana pembelajaran. Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola administrasi yang efektif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan perlindungan pekerja migran. Dengan demikian, KP2MI menjadi aktor kunci dalam menjaga hak dan martabat pekerja migran.

Dari perspektif Ekonomi Islam, perlindungan pekerja migran yang dilakukan KP2MI sejalan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, amanah, musyawarah, dan ihsan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai program administrasi yang dirancang untuk menjaga hak-hak pekerja migran. Mahasiswa magang menyadari bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam praktik birokrasi untuk memperkuat integritas dan profesionalisme. Pengalaman ini menunjukkan adanya sinergi antara dunia akademik dan dunia kerja dalam membangun perlindungan yang lebih humanis.

Penelitian ini sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam praktik administrasi publik. Kontribusi akademisi diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan di masa depan. Dengan pendekatan integratif, perlindungan pekerja migran dapat semakin optimal. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan dasar penting bagi penguatan peran KP2MI dalam perspektif Islam dan administrasi publik modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Along, Antonius. (2020). Kualitas Layanan Administrasi Akademik di Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01), 94–99. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.11>
- Andini, Dwi, Fadilah, Ewin Amar, Il, Nur Luluk, & Noviani, Dwi. (2023). Meningkatkan Kualitas Pendidik Terhadap Administrasi Kepegawaian Pendidikan. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 1(1), 133–144. <https://doi.org/10.00000/pjpi.v1n12023>
- Ariani, Ni Kadek, & Prabawati, Ni Putu Anik. (2025). Implementasi Kebijakan Pelayanan Apostille Berbasis Transformasi Digital di Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(3), 1–13. <https://doi.org/10.61292/shkr.255>
- Ilmu, Jurnal, Islam, Studi, & Sirait, Richart Bonar. (2025). *Al-Hukumah Deportation Process of Indonesian Migrant Workers in Tanjungpinang City*. 1(4), 142–154.
- Jamal, Nur, & Syarifah, Masykurotus. (2018). Pengelolaan Administrasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *KABILAH: Journal of Social Community*, 3(2), 210–222. <https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3410>
- Kristen Satya Wacana, Universitas, Kristiawan, Muhammad, & Asvio UIN STS Jambi, Nova. (2018). *K e l o l a J u r n a l M a n a j e m e n P e n d i d i k a n* Magister Manajemen Pendidikan FKIP Pengelolaan Administrasi Madrasah Tsanawiyah Negeri Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Madrasah. *Kelola Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 86–95.
- Lauren, Angel, Aryani, Sinta, Bella, Anisa, Eliza, Dewi, Publik, Ilmu Administrasi, & Sriwijaya, Universitas. (2025). KEINGINAN MIGRASI GENERASI MUDA DI INDONESIA Berdasarkan data Penempatan dan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia yang dipublikasikan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2620–2628.
- Nabhan Aiqani. (2025). *10 Prioritas Isu Bisnis Dan Ham Di Indonesia*.
- Paulina, Siti. (2023). Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pernikahan Dikantor Urusan Agama Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5431–5439. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1985>
- Pembangunan, Magister Studi, Ilmu, Fakultas, Dan, Sosial, Politik, Ilmu, & Utara, Universitas Sumatera. (2020). *Analisis Penerapan E-Government*. 3, 87–107.
- Program, Mahasiswa, Ilmu, Studi, Negara, Administrasi, & Administrasi, Departemen. (2018). *Kebijakan dan Manajemen Publik Inovasi Produk E-Lampid dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Surabaya Antya Seruni Duhita*. 6, 1–11.

- Purwanto, M. B. (2023). Manajerial Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Guru. *Jurnal Ilmiah LIMEEMAS*, 1, h. 5. Retrieved from <https://ejournal.apmapi.or.id/index.php/Limeemas/article/view/1%0Ahttps://ejournal.apmapi.or.id/index.php/Limeemas/article/download/1/1>
- Setyawati, Endang, Wijoyo, Hadion, Suyudi, Suyudi, & Gunantara, Foustino Asprilla. (2021). Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Surat Pengantar Berbasis Website Dengan Framework Codeigniter Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Desa Tambaksari Kidul Kabupaten Banyumas. *Jurnal Informasi Dan Komputer*, 9(1), 22–31. <https://doi.org/10.35959/jik.v9i1.191>
- Tawas, Hendra, Mananeke, Lisbeth, & Tuerah, Febriany Feibe Rosaline. (2015). Analisis Kualitas Layanan Akademik dan Administrasi terhadap Kepuasan Mahasiswa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 422–432.
- Valencia, Gavril, Putri, Dipo, & Dermawan, Windy. (2025). *Dinamika Kerja Sama Indonesia dan International Organization for Migration (IOM) dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang*. 8(2022), 9428–9439.
- Yayat Rukayat. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasirjambu. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, 11(2), 56–65.
- Yollan Lokabora, Marselus, & Fithriana, Noora. (2018). Inovasi Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(3), 64–69. Retrieved from www.publikasi.unitri.ac.id

Copyright holder:

Diva Gusti Yusra (2025)

First publication right:

Manarul Ilmi: Journal of Islamic Studies

This article is licensed under:

